

TATA KELOLA SISTEM PANGAN NASIONAL

dalam Perspektif
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: **Tata Kelola Sistem Pangan Nasional dalam
Perspektif Pembangunan Berkelanjutan**

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

29 March 2026

TATA KELOLA SISTEM PANGAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abstrak

Tata kelola sistem pangan nasional merupakan salah satu isu strategis paling penting dalam agenda pembangunan abad ke-21. Sistem pangan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai urusan produksi pertanian atau stabilisasi harga bahan pokok, melainkan sebagai jaringan yang menghubungkan produksi, distribusi, konsumsi, gizi, lingkungan, kesehatan, perdagangan, kelembagaan, dan ketahanan sosial. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, tata kelola pangan harus mampu menjamin ketercukupan pangan bagi seluruh penduduk sekaligus menjaga keberlanjutan basis ekologis, memperkuat penghidupan produsen, dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia masa depan. Makalah ini bertujuan menjelaskan landasan konseptual tata kelola sistem pangan nasional, mengulas posisi strategisnya dalam pembangunan berkelanjutan, menganalisis tantangan tata kelola pangan di Indonesia, serta menawarkan arah reformasi kelembagaan dan kebijakan yang lebih integratif. Secara konseptual, pembahasan bertumpu pada definisi ketahanan pangan menurut hukum nasional, konsep sustainable food systems dari FAO, target SDG 2, serta kerangka policy coherence for sustainable development dari OECD. Secara empiris, dunia masih menghadapi kerentanan pangan yang besar, sementara perubahan iklim, inflasi pangan, konflik, degradasi

lingkungan, dan malnutrisi memperumit pencapaian tujuan pembangunan. Indonesia sendiri telah menempatkan transformasi sistem pangan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2029, termasuk melalui penguatan inovasi pertanian, pendekatan Food-Energy-Water Nexus, dan koordinasi multipihak. Namun demikian, tantangan struktural tetap nyata, seperti fragmentasi kewenangan antarlembaga, ketimpangan wilayah, lemahnya integrasi gizi dalam kebijakan pangan, kerentanan petani kecil, serta belum optimalnya tata kelola data, logistik, dan cadangan pangan. Makalah ini berargumen bahwa pembangunan pangan berkelanjutan di Indonesia mensyaratkan tata kelola yang bersifat whole-of-government, whole-of-society, dan berbasis bukti. Reformasi tersebut perlu diwujudkan melalui integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan lembaga koordinatif, sistem data interoperabel, pendekatan gizi dan iklim yang lebih kuat, pemberdayaan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif petani, koperasi, UMKM, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, tata kelola sistem pangan nasional bukan hanya persoalan administrasi publik, melainkan fondasi strategis bagi keadilan sosial, kesehatan masyarakat, daya saing ekonomi, dan keberlanjutan generasi masa depan. ([BPK Peraturan](#))

Kata kunci: *tata kelola pangan, sistem pangan nasional, pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, kebijakan publik, Indonesia*

Tata Kelola Sistem Pangan Nasional dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Pada masa lalu, pembicaraan tentang pangan sering berhenti pada dua pertanyaan sederhana: apakah produksi mencukupi, dan apakah harga stabil. Dalam dunia sekarang, dua pertanyaan itu tetap penting, tetapi tidak lagi memadai. Pangan telah menjadi isu lintas sektor yang mempengaruhi kesehatan, produktivitas, stabilitas sosial, kualitas lingkungan, hingga legitimasi negara. Target SDG 2 menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya “mengakhiri kelaparan”, tetapi juga harus memastikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, menggandakan produktivitas produsen pangan skala kecil, serta memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim serta bencana. Karena itu, tata kelola pangan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. ([Sustainable Development Goals](#))

Konteks global menunjukkan betapa mendesaknya isu ini. Laporan SOFI 2025 mencatat bahwa sekitar 673 juta orang, atau 8,2 persen populasi dunia, mengalami kelaparan pada 2024. Walaupun angka ini sedikit membaik dibanding 2023, situasi global tetap rapuh karena pemulihan berlangsung tidak merata, harga pangan yang tinggi masih menekan daya beli, dan kawasan tertentu—terutama sebagian Afrika dan Asia Barat—masih mengalami kemunduran. Pada saat yang sama, World Bank menekankan bahwa sistem pangan global mengandung biaya tersembunyi yang besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian, sehingga reformasi kebijakan pangan tidak dapat ditunda hanya karena ada sedikit perbaikan statistik jangka pendek. ([FAOHome](#))

Indonesia menghadapi persoalan yang sama, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks karena karakter geografis kepulauan, ketimpangan wilayah, keberagaman produksi dan konsumsi, serta besarnya jumlah penduduk. Indonesia juga tetap menghadapi beban ganda bahkan tiga beban

malnutrisi: kekurangan gizi, kekurangan mikronutrien, dan kelebihan berat badan atau obesitas. UNICEF menegaskan bahwa Indonesia masih bergulat dengan triple burden of malnutrition, sementara laporan terbarunya menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat program diet berkualitas, pelayanan gizi, dan koordinasi antarprogram. Ini berarti persoalan pangan di Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai soal beras atau output pertanian, tetapi harus dibaca sebagai persoalan sistem pangan nasional. ([UNICEF](#))

Karena itulah, makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: bagaimana tata kelola sistem pangan nasional seharusnya dibangun dalam perspektif pembangunan berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan ini penting, sebab keberhasilan sistem pangan akan menentukan kualitas generasi masa depan. Anak yang tumbuh dengan diet buruk, keluarga yang rentan terhadap inflasi pangan, petani yang terjebak pada produktivitas rendah, dan ekosistem yang terus rusak adalah tanda bahwa tata kelola pangan belum berfungsi secara berkelanjutan. Sebaliknya, sistem pangan yang dikelola dengan baik dapat menjadi basis bagi kesehatan publik, stabilitas ekonomi, transformasi desa, dan ketahanan nasional. ([World Health Organization](#))

1. Landasan Konseptual Tata Kelola Sistem Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini sangat penting karena sejak awal hukum nasional tidak membatasi pangan pada ketersediaan semata. Ia memasukkan dimensi mutu, keamanan, keberagaman, pemerataan, keterjangkauan, keberlanjutan, bahkan kesesuaian budaya. Dengan kata

lain, secara normatif Indonesia sebenarnya telah memiliki basis konseptual yang cukup luas untuk membangun sistem pangan yang modern dan inklusif. ([BPK Peraturan](#))

Di tingkat internasional, FAO mendefinisikan sustainable food system sebagai sistem yang mampu menyediakan ketahanan pangan dan gizi bagi semua orang dengan cara yang tidak mengorbankan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperlukan untuk ketahanan pangan generasi mendatang. Definisi ini memperluas cakupan sistem pangan dari sekadar rantai pasok menjadi keseluruhan hubungan antara produksi, distribusi, konsumsi, lembaga, infrastruktur, jasa pendukung, serta dampaknya terhadap manusia dan alam. Dengan demikian, "sistem pangan" bukan hanya urusan sawah, pasar, atau gudang, tetapi keseluruhan proses yang membentuk apa yang dimakan masyarakat, bagaimana pangan diproduksi, siapa yang mendapat manfaat, dan siapa yang menanggung biayanya. ([OpenKnowledge FAO](#))

Perspektif pembangunan berkelanjutan menambahkan dimensi koherensi kebijakan. OECD menekankan bahwa food systems menghadapi triple challenge: memastikan ketahanan pangan dan gizi, menopang penghidupan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah perubahan dalam satu dimensi dapat menghasilkan dampak positif atau negatif pada dimensi lain, sehingga kebijakan harus dirancang secara koheren lintas sektor, lintas tingkat pemerintahan, dan lintas waktu. Dalam kerangka ini, tata kelola bukan sekadar keberadaan institusi, tetapi kemampuan institusi untuk mengelola trade-offs dan synergies secara sadar, transparan, dan adaptif. ([OECD](#))

Konsep tata kelola sistem pangan karena itu berbeda dari administrasi pangan konvensional. Tata kelola sistem pangan mencakup cara negara, pasar, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lembaga internasional berinteraksi untuk menetapkan tujuan, membagi kewenangan, memproduksi data, menyelesaikan konflik kepentingan, dan menilai hasil

kebijakan. FAO bahkan menegaskan bahwa transformasi agrifood systems memerlukan mekanisme governance innovation yang memperkuat koordinasi, integrasi kebijakan, dan partisipasi. Dalam konteks ini, keberhasilan pangan tidak cukup diukur dari banyaknya program, melainkan dari kualitas orkestrasi antarpelaku. ([FAOHome](#))

2. Sistem Pangan Nasional sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa kebutuhan generasi sekarang dipenuhi tanpa merusak kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam sistem pangan, prinsip ini berarti negara harus menjamin pangan cukup dan terjangkau hari ini, namun tidak dengan cara yang merusak tanah, menguras air, mempercepat emisi, memiskinkan petani, atau mendorong konsumsi yang merusak kesehatan masyarakat. Karena itu, sistem pangan berdiri di persimpangan antara ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. World Bank melalui FoodSystems 2030 menekankan bahwa sistem pangan perlu ditransformasikan agar dapat menyediakan diet bergizi yang terjangkau, meningkatkan penghidupan, dan selaras dengan tujuan pembangunan serta iklim. ([The World Bank](#))

Dari sudut kesehatan, tata kelola pangan yang baik harus mengarah pada diet yang sehat. WHO pada 2026 menegaskan bahwa diet sehat melindungi masyarakat dari semua bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular, serta bahwa pola makan yang dibentuk sejak masa kanak-kanak dan remaja cenderung berlanjut ke usia dewasa. WHO juga menyatakan bahwa membangun lingkungan pangan sehat memerlukan koherensi kebijakan nasional di bidang kesehatan, pangan dan pertanian, pendidikan, fiskal, dan perdagangan. Artinya, tata kelola pangan berkelanjutan tidak boleh berhenti pada sisi penawaran, tetapi harus menyentuh lingkungan konsumsi, edukasi gizi, label pangan, kebijakan sekolah, dan insentif pasar. ([World Health Organization](#))

Dari sudut lingkungan, sistem pangan berada dalam posisi paradoks. Ia dibutuhkan untuk menopang hidup manusia, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan pada alam. OECD menegaskan bahwa food systems simultaneously vulnerable to climate change and an important contributor to it. World Bank dalam laporan Climate-Smart Agriculture in Indonesia juga menekankan bahwa perubahan iklim menuntut pertanian ditransformasikan agar tetap mendukung pembangunan dan ketahanan pangan. Maka, tata kelola pangan berkelanjutan harus mampu menjembatani agenda produktivitas dengan agenda konservasi. Produktivitas tanpa keberlanjutan hanya menunda krisis; keberlanjutan tanpa produktivitas akan gagal menjawab kebutuhan masyarakat. ([OECD](#))

Dari sudut sosial-ekonomi, sistem pangan memengaruhi penghidupan jutaan rumah tangga produsen kecil, pedagang, nelayan, pekerja logistik, dan UMKM pengolahan pangan. OECD menekankan bahwa tantangan pangan selalu terkait dengan livelihoods, bukan hanya nutrition. Itulah sebabnya kebijakan pangan yang hanya berorientasi pada harga konsumen, tanpa memperhatikan kesejahteraan produsen, akan menghasilkan ketidakstabilan dalam jangka panjang. Jika petani, nelayan, dan produsen kecil terus menanggung risiko terbesar namun menerima nilai tambah terkecil, maka sistem pangan tidak akan tangguh. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, efisiensi ekonomi harus disertai keadilan distribusi manfaat. ([OECD](#))

3. Arsitektur Tata Kelola Pangan di Indonesia

Secara normatif, Indonesia memiliki fondasi kelembagaan yang relatif lengkap. Undang-Undang Pangan 2012 menjadi dasar utama, sementara Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 membentuk Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa tugasnya adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dengan fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan pada ranah ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi,

penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Secara teoritis, desain ini menempatkan Bapanas sebagai institusi penting untuk mengurangi fragmentasi tata kelola. ([Badan Pangan Nasional](#))

Selain Bapanas, tata kelola pangan nasional juga melibatkan Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bulog, pemerintah daerah, dan kini juga Badan Gizi Nasional dalam beberapa agenda gizi publik. Secara politik-perencanaan, RPJMN 2025–2029 melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 menjadi landasan pembangunan nasional lima tahunan. Setneg menegaskan bahwa RPJMN 2025–2029 membidik penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan; Bappenas kemudian menegaskan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah transformasi sistem pangan yang menekankan kemandirian pangan melalui inovasi teknologi pertanian. ([BPK Peraturan](#))

Arah ini diperkuat lagi oleh berbagai pernyataan kebijakan pada 2025–2026. Bappenas menyatakan bahwa sektor pertanian memegang peran strategis dalam transformasi ekonomi hijau sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Bappenas juga mendorong pendekatan Food-Energy-Water Nexus sebagai salah satu jalan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Pendekatan nexus ini penting karena menunjukkan pergeseran dari logika sektoral menuju logika keterkaitan sumber daya. Pangan tidak dapat dipisahkan dari air dan energi; begitu pula kebijakan pangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa memikirkan irigasi, energi untuk produksi dan distribusi, serta ketahanan ekologi. ([Bappenas](#))

Di sisi implementasi, Indonesia juga telah menempuh jalur transformasi sistem pangan melalui national pathway hasil dialog nasional dan subnasional dalam kerangka UN Food Systems Summit. Menurut UN in Indonesia, pemerintah telah mengembangkan national pathway for

transforming food systems dan sedang membangun multi-stakeholder platform untuk menerjemahkan jalur transformasi itu menjadi proyek kolaboratif yang konkret. FAO juga menegaskan bahwa di Indonesia, inovasi tata kelola pangan diarahkan pada mekanisme koordinasi yang lebih baik, integrasi kebijakan, dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun subnasional. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan ketiadaan agenda, melainkan kebutuhan untuk memperkuat pelaksanaan dan sinkronisasinya. ([The United Nations in Indonesia](#))

4. Tantangan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

Tantangan pertama adalah fragmentasi kewenangan. Sistem pangan menyentuh pertanian, perdagangan, kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, industri, logistik, dan lingkungan. OECD menegaskan bahwa kebijakan pangan membutuhkan whole-of-government coordination, keterlibatan pemerintah subnasional, serta sistem monitoring, reporting, and evaluation yang kuat. Dalam praktik Indonesia, keberadaan banyak institusi justru dapat menghasilkan tumpang tindih mandat, jeda koordinasi, atau tarik-menarik prioritas. Misalnya, kebijakan yang bertujuan menurunkan harga konsumen dalam jangka pendek dapat bertabrakan dengan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan investasi. Ketika trade-off semacam ini tidak diatur secara eksplisit, tata kelola cenderung menjadi reaktif. ([OECD](#))

Tantangan kedua adalah ketimpangan kapasitas antardaerah. Indonesia adalah negara besar dengan kondisi agroekologi, infrastruktur, kualitas kelembagaan, dan kapasitas fiskal daerah yang sangat beragam. UN in Indonesia menekankan pentingnya local food systems serta perlunya strategi yang mempertimbangkan keragaman geografis. Bila tata kelola pangan terlalu tersentralisasi, kebijakan cenderung tidak peka terhadap variasi konteks lokal; tetapi bila terlalu terdorong ke daerah tanpa dukungan kapasitas, implementasinya menjadi timpang. Dalam perspektif

pembangunan berkelanjutan, tata kelola harus mampu mengombinasikan arah strategis nasional dengan ruang diferensiasi wilayah. ([The United Nations in Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah lemahnya integrasi antara pangan dan gizi. Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, sementara UNICEF menegaskan bahwa perbaikan gizi membutuhkan intervensi yang melampaui layanan kesehatan semata. Dalam banyak kasus, kebijakan pangan nasional masih dominan diukur dari sisi komoditas strategis dan stabilitas harga, sedangkan kualitas diet, minimum dietary diversity, keamanan pangan, dan lingkungan konsumsi belum menjadi pusat evaluasi yang setara. WHO secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah harus menciptakan koherensi kebijakan nasional untuk mempromosikan diet sehat, termasuk melalui kebijakan pertanian, fiskal, pendidikan, dan perdagangan. Tanpa integrasi ini, tata kelola pangan akan berhasil di atas kertas namun gagal pada kualitas manusia. ([UNICEF](#))

Tantangan keempat adalah kerentanan terhadap perubahan iklim dan gangguan eksternal. World Bank menjelaskan bahwa climate-smart agriculture bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan secara berkelanjutan, beradaptasi dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mengurangi emisi bila memungkinkan. OECD menambahkan bahwa sistem pangan sangat rentan terhadap berbagai shocks, dari pandemi dan perang hingga gangguan cuaca ekstrem, dan karena itu strategi resiliensi harus bersifat inklusif, berulang, dan melibatkan pemerintah. Artinya, tata kelola pangan modern tidak cukup hanya memiliki program rutin; ia harus memiliki kemampuan antisipatif, foresight, pemetaan risiko, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. ([World Bank](#))

Tantangan kelima adalah kualitas data dan bukti kebijakan. OECD dalam kajian tentang evidence gaps on food systems menegaskan bahwa walaupun banyak bukti telah tersedia, masih ada kesenjangan data yang

signifikan untuk mendukung kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, data produksi, stok, harga, distribusi, kerawanan pangan, gizi, dan food loss sering berasal dari sistem yang berbeda, definisi yang tidak selalu seragam, dan siklus pembaruan yang tidak sinkron. Akibatnya, pengambilan keputusan kerap terlambat atau parsial. Tata kelola pangan yang baik membutuhkan interoperabilitas data, bukan sekadar banyak dashboard. ([OECD](#))

Tantangan keenam adalah kecenderungan menilai keberhasilan pangan secara sempit. Dalam banyak diskusi publik, keberhasilan masih diasosiasikan terutama dengan naiknya produksi komoditas tertentu atau stabilnya satu-dua harga pangan. Padahal Bapanas sendiri dalam visi dan tujuannya menempatkan penguatan logistik, penurunan daerah rentan rawan pangan, diversifikasi konsumsi, dan jaminan keamanan mutu pangan segar sebagai sasaran penting. Bila ukuran kinerja nasional terlalu sempit, maka insentif birokrasi akan ikut sempit. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, indikator pangan harus mencakup dimensi availability, access, nutrition, resilience, dan sustainability sekaligus. ([Badan Pangan Nasional](#))

5. Reformasi Tata Kelola: Arah Kebijakan yang Diperlukan

Pertama, Indonesia memerlukan penguatan kerangka policy coherence for food systems. OECD menekankan tiga pilar koherensi untuk pembangunan berkelanjutan: visi strategis jangka panjang yang terintegrasi, mekanisme kelembagaan yang efektif dan inklusif, serta perangkat adaptif untuk mengantisipasi dampak kebijakan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ini berarti setiap kebijakan pangan harus diuji terhadap pengaruhnya pada gizi, penghidupan produsen, daya beli masyarakat, emisi, penggunaan air, dan keberlanjutan lahan. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi berdiri sendiri per sektor, tetapi menjadi bagian dari arsitektur tujuan nasional yang sama. ([OECD](#))

Kedua, lembaga koordinatif harus diperkuat secara substantif, bukan hanya formal. Bapanas memiliki mandat penting dalam koordinasi kebijakan pangan, tetapi koordinasi yang efektif memerlukan otoritas, data, dan mekanisme resolusi konflik antar-instansi. Penguatan ini perlu terhubung dengan Bappenas sebagai simpul perencanaan nasional, sehingga pangan tidak diperlakukan sebagai sektor tunggal, melainkan sebagai domain lintas kebijakan. FAO menilai bahwa inovasi tata kelola yang berhasil adalah yang meningkatkan koordinasi, integrasi, dan partisipasi secara nyata. Maka, forum koordinasi pangan harus didesain sebagai arena pengambilan keputusan bersama, bukan sekadar rapat serial. ([Badan Pangan Nasional](#))

Ketiga, penguatan tata kelola harus bergerak ke tingkat daerah. Pangan selalu bermuara di ruang lokal: produksi berada di desa, distribusi bergantung pada jaringan wilayah, dan kerentanan pangan muncul dalam konteks kabupaten/kota yang sangat spesifik. Karena itu, pendelegasian peran kepada daerah perlu dibarengi dengan penguatan perencanaan, pembiayaan, dan sistem informasi daerah. Hasil FSVA 2025 dari Bapanas yang masih menunjukkan adanya kabupaten/kota rentan rawan pangan memperlihatkan bahwa risiko pangan tidak seragam dan karena itu memerlukan respon yang teritorial. Tata kelola nasional yang baik harus mampu membaca keragaman wilayah, bukan menyeragamkannya. ([Badan Pangan Nasional](#))

Keempat, gizi harus diletakkan di jantung tata kelola pangan. Tata kelola sistem pangan yang baik harus bertanya bukan hanya "berapa ton yang diproduksi", tetapi juga "diet seperti apa yang tersedia dan terjangkau". WHO menekankan peran pemerintah dalam menciptakan healthy food environment melalui koherensi kebijakan, subsidi yang tepat, pendidikan gizi, kebijakan sekolah, pelabelan, dan regulasi terhadap pangan yang tidak sehat. Bagi Indonesia, ini berarti integrasi yang jauh lebih kuat antara sistem pangan dan sistem kesehatan, termasuk program makanan sekolah, intervensi ibu-anak, penganekaragaman konsumsi, serta perlindungan

kelompok rentan di daerah miskin dan terpencil. ([World Health Organization](#))

Kelima, tata kelola pangan harus berbasis resiliensi. OECD 2025 menunjukkan bahwa proses membangun food systems resilience harus inklusif, recurring, dan melibatkan governments; proses itu juga perlu mendefinisikan tujuan resiliensi, menilai risiko dan peluang, serta menghasilkan action plans with clear responsibilities. Indonesia dapat menerapkan prinsip ini melalui pemetaan risiko pangan nasional dan daerah, stress test logistik pangan, integrasi early warning system iklim-pangan, pembagian peran yang tegas antara pemerintah pusat, daerah, BUMN pangan, dan aktor pasar, serta evaluasi pascakrisis yang sistematis. Ini akan membuat kebijakan pangan lebih antisipatif daripada sekadar reaktif. ([OECD](#))

Keenam, integrasi data pangan nasional harus menjadi prioritas reformasi. Sistem pangan yang kompleks tidak dapat diatur hanya melalui intuisi politik atau data parsial. Pemerintah memerlukan satu ekosistem data yang menghubungkan produksi, harga, stok, konsumsi, gizi, logistik, kerawanan wilayah, perubahan iklim, dan pembiayaan. Dengan demikian, keputusan dapat dibuat lebih cepat dan lebih akurat. OECD sudah mengingatkan bahwa evidence gaps menghambat kebijakan pangan yang lebih baik; sementara Bapanas sendiri telah mengembangkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, panel harga, serta indikator kerawanan. Langkah berikutnya ialah menyatukan ekosistem tersebut dalam kerangka interoperabilitas nasional yang dapat dipakai lintas lembaga dan lintas daerah. ([OECD](#))

Ketujuh, pembangunan pangan berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha yang lebih terstruktur. UN in Indonesia mencatat bahwa Indonesia sedang menyiapkan multi-stakeholder platform untuk mewujudkan transformasi sistem pangan. Pendekatan ini tepat, sebab sistem pangan tidak dapat dibangun oleh negara sendiri. Koperasi

desa, UMKM pengolahan, pelaku logistik, ritel, perusahaan pangan, perguruan tinggi, organisasi perempuan, komunitas petani, dan masyarakat sipil harus terlibat bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai co-producers of policy. Partisipasi yang bermakna akan memperkaya data lapangan, mengurangi blind spots kebijakan, dan meningkatkan legitimasi keputusan publik. ([The United Nations in Indonesia](#))

6. Implikasi bagi Generasi Masa Depan

Mengapa tata kelola sistem pangan nasional harus dilihat dalam perspektif generasi masa depan? Jawabannya sederhana tetapi mendasar: karena pangan membentuk kualitas manusia sebelum ia membentuk statistik ekonomi. Diet anak-anak hari ini menentukan kapasitas belajar, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas masa depan. WHO menyatakan bahwa praktik diet sehat sejak awal kehidupan memengaruhi perkembangan kognitif dan kesehatan sepanjang hidup. UNICEF juga terus menekankan bahwa tantangan gizi Indonesia berkaitan dengan layanan, pola makan, dan lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, kegagalan tata kelola pangan hari ini akan muncul kembali dalam bentuk rendahnya kualitas sumber daya manusia esok hari. ([World Health Organization](#))

Bagi generasi muda Indonesia, tata kelola pangan yang baik juga berarti pembentukan masa depan desa dan pertanian yang lebih bermartabat. Bila sistem pangan dirancang hanya untuk menekan harga jangka pendek tanpa memberi ruang inovasi, nilai tambah, dan kepastian pendapatan bagi produsen, maka sektor pangan akan ditinggalkan generasi muda. Sebaliknya, bila sistem pangan terhubung dengan teknologi, pengolahan, kewirausahaan, logistik modern, dan ekonomi hijau, maka ia dapat menjadi ruang baru bagi mobilitas sosial dan inovasi. Karena itu, reformasi tata kelola pangan harus dibaca pula sebagai strategi regenerasi ekonomi nasional. ([World Bank](#))

Dalam pengertian ekologis, generasi masa depan berhak mewarisi basis alam yang tetap produktif. Sistem pangan yang mengejar output dengan mengorbankan tanah, air, dan keanekaragaman hayati sesungguhnya sedang memindahkan beban pembangunan ke pundak anak cucu. Itulah sebabnya FAO menekankan bahwa keberlanjutan berarti tidak mengompromikan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi selanjutnya. Maka tata kelola pangan nasional yang berkelanjutan harus berani mengintegrasikan agenda konservasi, restorasi, efisiensi sumber daya, dan adaptasi iklim ke dalam jantung kebijakan pangan.

([OpenKnowledge FAO](#))

Penutup

Makalah ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem pangan nasional merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan, bukan isu sektoral yang terpisah dari agenda ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Landasan normatif Indonesia melalui UU Pangan 2012 telah menyediakan definisi yang komprehensif tentang ketahanan pangan, sedangkan kerangka internasional dari FAO, WHO, OECD, dan SDG 2 memperjelas bahwa pangan harus dibangun melalui sistem yang koheren, sehat, tangguh, dan berkeadilan. Di tengah ancaman kelaparan global, inflasi pangan, perubahan iklim, dan malnutrisi, tata kelola pangan tidak dapat lagi diserahkan pada logika sektoral dan jangka pendek. ([BPK Peraturan](#))

Dalam konteks Indonesia, arah transformasi sudah tampak melalui RPJMN 2025–2029, penguatan Badan Pangan Nasional, pendekatan FEW Nexus, serta upaya membangun jalur transformasi dan platform multipihak. Namun tantangan implementasi masih besar: koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya solid, integrasi gizi ke dalam kebijakan pangan masih perlu diperdalam, kualitas data dan kapasitas daerah belum merata, dan orientasi kebijakan kadang masih terlalu sempit. Karena itu, reformasi tata kelola perlu diarahkan pada koherensi kebijakan, penguatan lembaga

koordinatif, desentralisasi yang cerdas, integrasi data, orientasi gizi, serta strategi resiliensi yang berulang dan inklusif. ([Bappenas](#))

Pada akhirnya, tata kelola sistem pangan nasional bukan hanya soal memastikan ada makanan di meja makan. Ia adalah soal bagaimana negara menata hubungan antara manusia, pasar, alam, ilmu pengetahuan, dan keadilan sosial. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan tata kelola pangan terletak pada kemampuannya menghadirkan pangan yang cukup, sehat, aman, terjangkau, dan bergizi hari ini, sambil tetap menjaga ruang hidup dan kesempatan yang adil bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, tata kelola pangan yang baik bukan sekadar kebijakan ekonomi; ia adalah etika pembangunan. ([OpenKnowledge FAO](#))

Glosarium

Cadangan pangan

Persediaan pangan yang dikelola untuk menjaga ketersediaan, menghadapi gejolak harga, bencana, atau keadaan darurat.

Food-Energy-Water Nexus

Pendekatan yang melihat keterkaitan pangan, energi, dan air sebagai satu sistem yang saling mempengaruhi.

Ketahanan pangan

Kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau bagi negara sampai perseorangan secara berkelanjutan.

Koherensi kebijakan

Keselarsan desain dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintahan agar tidak saling bertentangan dan mampu mencapai tujuan bersama.

Malnutrisi

Kondisi gizi yang meliputi kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, maupun kelebihan berat badan atau obesitas.

Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Resiliensi sistem pangan

Kemampuan sistem pangan untuk menyerap, beradaptasi, dan bertransformasi ketika menghadapi guncangan atau tekanan.

Sistem pangan

Keseluruhan aktivitas, pelaku, institusi, dan proses yang terlibat dalam produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi, dan pembuangan pangan beserta dampaknya.

Tata kelola sistem pangan

Cara berbagai aktor publik, privat, dan sosial mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi sistem pangan agar mencapai tujuan bersama.

Triple burden of malnutrition

Tiga beban malnutrisi yang mencakup kekurangan gizi, kekurangan mikronutrien, dan kelebihan berat badan/obesitas.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pangan Nasional. (2025). *Rencana strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025–2029*.

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Sejarah Badan Pangan Nasional*.

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional*.

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Visi dan misi Badan Pangan Nasional*.

Badan Pangan Nasional. (2025, August 27). *Badan Pangan Nasional luncurkan FSVA dan IKP 2025, jadi baseline pembangunan ketahanan pangan nasional*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, December 5). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, June 23). *Bappenas dan CIRAD sepakati kerja sama strategis untuk ketahanan pangan dan transformasi pertanian*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Sustainable food systems: Concept and framework*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *Governance innovation for sustainable development of food systems*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Making better policies for food systems*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Overcoming evidence gaps on food systems*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Practical approaches to develop resilience strategies for food systems*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, March 7). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2045*.

United Nations. (n.d.). *Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*.

United Nations in Indonesia. (2023, July 25). *Advancing Indonesia's food systems transformation: A stocktaking moment*.

United Nations Children's Fund Indonesia. (2025). *Indonesia 2018–2024 national nutrition programme review: Synthesis report*.

World Bank. (2021). *Climate-smart agriculture in Indonesia*.

World Bank. (2025). *Rising to the challenge of transformation: Annual report fiscal year 2025*.

World Health Organization. (2026, January 26). *Healthy diet*.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991>